

Penerapan Model Panel: Determinan Tingkat Pertumbuhan Inklusif Indonesia

Kandi Dwi Pratiwi^{1*} dan Dita Kurniasari²

¹ Direktorat Neraca Produksi, Badan Pusat Statistik, Jakarta Pusat, Indonesia

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, Indonesia

Korespondensi: * kandi.dwi@bps.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i1.163> | halaman: 38 – 78

Dikirim: 20-06-2022 | Diterima: 25-03-2023 | Dipublikasikan: 31-03-2023

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berfluktuasi selama periode 2012-2020. Selama tahun 2012-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran angka 5 persen. Hingga pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -2,02 persen sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi, serta penyerapan tenaga kerja yang belum optimal menunjukkan belum tercapainya kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Konsep pertumbuhan inklusif diperlukan sebagai ukuran tambahan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pertumbuhan inklusif serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan sebagian besar wilayah di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2020 memiliki tingkat pertumbuhan inklusif menengah. Hasil regresi data panel menunjukkan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan inklusif di Indonesia. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan inklusif.

Kata kunci: pertumbuhan inklusif; indeks inklusif II; regresi data panel.

I. Pendahuluan

Sejauh ini pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator terpenting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah (Sukirno, 2004) dan ditandai dengan peningkatan perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata atas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian di suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam suatu periode tertentu. Negara-negara sedang berkembang, seperti Indonesia lebih berfokus pada pembangunan yang eksklusif yaitu pembangunan yang hanya menjadikan aspek pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tujuan pencapaian, terutama pada sektor sekunder dan tersier. Pemerintah selalu memasang target yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang semakin baik dan stabil dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada skala regional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2012 hingga 2020 sebesar 4,54 persen. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian global dengan rata-rata 2,28 persen. Kondisi ini menjadi modal utama dalam mendorong perbaikan standar hidup penduduk Indonesia karena pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu faktor pendorong menurunnya kemiskinan (Bappenas, 2018). Terlebih lagi, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Sumber daya alam yang melimpah, angkatan kerja yang jumlahnya tidak sedikit, dan wilayah yang terbentang luas dapat dioptimalkan untuk menekan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung tinggi ternyata masih belum mampu mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia. Permasalahan yang terjadi di Indonesia antara lain kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, serta penyerapan tenaga kerja yang rendah.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Indonesia berada pada kisaran 10 persen pada periode 2012-2020. Angka ini monoton turun hingga tahun 2019, tetapi meningkat di tahun 2020 sehingga menjadi 9,78 persen. Meskipun angka ini terlihat kecil, tetapi jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup banyak mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar, bahkan menjadi negara dengan penduduk terbanyak keempat, setelah China, India, dan Amerika Serikat.

Selain itu, kondisi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia sejalan dengan arah kemiskinan. Salah satu indikator ketimpangan distribusi pendapatan dihitung dengan koefisien gini. Semakin besar nilai koefisien gini menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tinggi. Pada periode 2012-2020 nilai koefisien gini Indonesia cenderung menurun. Koefisien gini di Indonesia pada periode 2012-2020 berada di kisaran 0,4. Nilai terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,38 dan tertinggi pada 2013 sebesar 0,41. Menurut Todaro & Smith (2012), nilai ini menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan di Indonesia, semula termasuk dalam ketimpangan pendapatan sedang, yang selanjutnya berangsur-angsur ke ketimpangan pendapatan relatif rendah atau pemerataan pendapatan yang relatif sama.

Apabila ditinjau dari sisi penyerapan tenaga kerja, nilainya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, penyerapan tenaga kerja di Indonesia sebesar 65,15 persen. Angka ini memiliki arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, terdapat 65-66 orang penduduk yang

bekerja. Angka ini hampir sama sepanjang periode 2012-2020, hanya angka penyerapan tenaga kerja di tahun 2016 yang menunjukkan penurunan signifikan menjadi 64,31 persen.

Berdasarkan uraian di atas, pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Hal ini karena dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi hanya berdasarkan pada PDB dan tidak memperhatikan masalah peningkatan penyerapan tenaga kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Menurut Maskin (2012), mengukur pembangunan hanya dari produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi menghilangkan kenyataan ada ketimpangan di masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Hal ini disebabkan produk domestik bruto hanya melihat pendapatan secara rata-rata, tanpa melihat manfaat pembangunan pada manusia. Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila memperhatikan masalah kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan.

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat dan menciptakan peluang bagi semua. Dengan kata lain, pertumbuhan inklusif tidak hanya mengenai perluasan ekonomi nasional, tetapi juga menjangkau penduduk yang paling rentan di masyarakat. Kesetaraan kesempatan dan partisipasi dalam pertumbuhan oleh seluruh lapisan masyarakat terutama pada masyarakat miskin dan pengangguran adalah dasar pertumbuhan inklusif. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* pertama, kedelapan, dan kesepuluh yaitu mengakhiri kemiskinan masyarakat dalam bentuk apapun; pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja yang layak; serta mengurangi kesenjangan.

Oleh karena itu, konsep pertumbuhan inklusif diperlukan sebagai ukuran tambahan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat pertumbuhan inklusif di Indonesia pada tahun 2012 hingga 2020 serta untuk menganalisis pengaruh TIK dan variabel lainnya terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia tahun 2012-2020.

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi inklusif di negara-negara berkembang mulai banyak diperbincangkan. Anand et al. (2013) menggunakan metode regresi data panel menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan, keterbukaan perdagangan, dan investasi mempunyai hubungan positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini sejalan dengan penelitian Sholihah et al. (2013).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Handika (2018) dengan menggunakan metode (*Poverty Equivalent Growth Rate*) PEGR untuk menghitung pertumbuhan inklusif, menyimpulkan bahwa Provinsi Papua memiliki pertumbuhan yang tidak inklusif. Hasil regresi menunjukkan bahwa DAU, DAK, dan PMTB berpengaruh positif terhadap inklusivitas dalam menurunkan kemiskinan, sedangkan PAD dan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap inklusivitas dalam menurunkan ketimpangan. Lalu, Hartono (2018) dalam penelitiannya menggunakan Indeks Inklusif II yang dirumuskan oleh Ramos et al. (2013). Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan inklusif Jawa Tengah tergolong pada tingkat menengah. Upah Minimum Kabupaten (UMK), dan inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif, sedangkan PMTB berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan inklusif.

II. Metode Penelitian

2.1. Landasan Teori

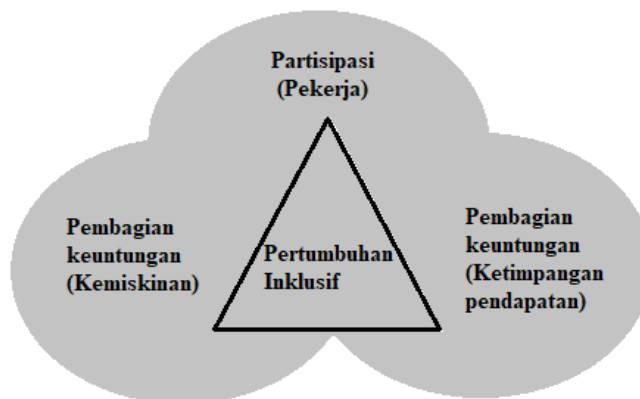
Menurut para ahli, pertumbuhan inklusif memiliki berbagai definisi. Ali & Zhuang (2007) menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif mencakup strategi untuk mengurangi kemiskinan secara efektif dan memperluas agenda pembangunan. Pertumbuhan inklusif bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dan memungkinkan seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi yang difokuskan pada penciptaan peluang ekonomi dan dapat diakses untuk semua lapisan masyarakat.

Menurut Ali & Son (2007) pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga pertumbuhan yang memastikan kesempatan yang sama untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Hasil yang diharapkan dari pertumbuhan ekonomi inklusif yaitu:

- a. Pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan
- b. Inklusi sosial, yaitu menghilangkan hambatan kelembagaan dan peningkatan insentif untuk meningkatkan akses untuk seluruh lapisan masyarakat
- c. Pemberdayaan, yaitu peningkatan aset serta kemampuan individu maupun kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan
- d. Keamanan, yaitu manajemen yang lebih baik terhadap risiko sosial yang timbul akibat intervensi pembangunan.

Dua dimensi utama dalam pertumbuhan inklusif menurut McKinley (2010) yaitu:

- a. Mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang akan menciptakan dan memperluas peluang ekonomi
- b. Memastikan akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi sehingga anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan.



Gambar 1. Dimensi dan indikator pertumbuhan inklusif

Sumber: Ramos, Ranieri, dan Lammens dalam IPC-IG (2013)

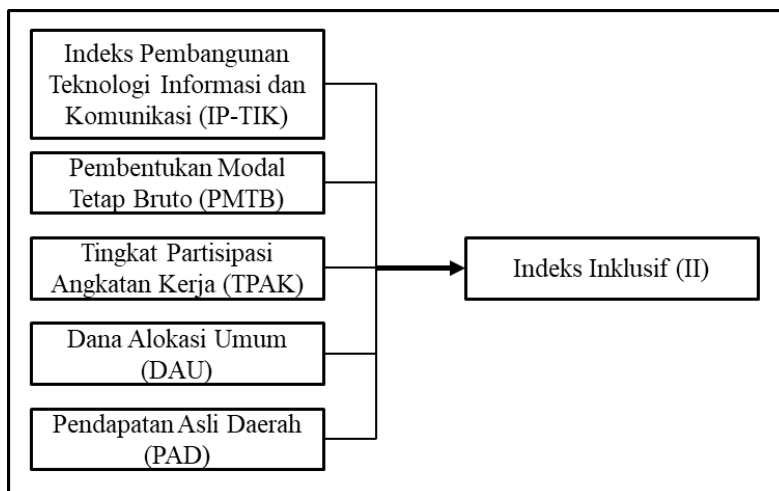
Ramos *et al.* (2013) menyatakan bahwa pertumbuhan inklusif merupakan suatu proses untuk meningkatkan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) dan partisipasi masyarakat. Setiap orang diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pertumbuhan dan memastikan

manfaatnya terdistribusikan secara merata. Tiga indikator yang mendasari dari definisi tersebut yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan penyerapan tenaga kerja (Gambar 1). Pengembangan kerangka pertumbuhan inklusif dapat diukur dari hasil pertumbuhan didistribusikan, hal tersebut berkaitan dengan kemiskinan dan ketimpangan, serta bagaimana pertumbuhan mengubah peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi atau bekerja.

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang tidak hanya terfokus untuk meningkatkan pendapatan suatu wilayah, melainkan juga diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat berdampak pada penurunan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk panel yang terdiri dari 34 provinsi di Indonesia tahun 2012–2020. Data yang digunakan berupa persentase penduduk miskin, gini rasio, dan penyerapan tenaga kerja untuk pembentukan Indeks Inklusif II, serta variabel sosial ekonomi seperti Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2021). Variabel dependen di dalam penelitian ini adalah Indeks Inklusif II, sedangkan variabel independen yang digunakan antara lain Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka pikir penelitian

2.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif berupa pembentukan Indeks Inklusif II sedangkan analisis inferensia berupa regresi data panel. Regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggunakan kombinasi data antara data *cross section* dan data *time series*. Pertumbuhan inklusif dihitung dengan Indeks Inklusif II yang dirumuskan oleh Ramos et al. (2013). Indeks

Inklusif II merupakan rata-rata sederhana dari normalisasi *min-max* dari tiga komponen pertumbuhan inklusif, yaitu tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dan *invers* normalisasi *min-max* untuk tingkat penyerapan tenaga kerja. Nilai indeks berada di antara nol hingga satu (0-1). Nilai indeks yang semakin mendekati nol menunjukkan pertumbuhan yang semakin inklusif. Pertumbuhan yang semakin inklusif menandakan terjadinya penurunan angka kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Klasifikasi Indeks Inklusif II menurut Ramos, Ranieri, dan Lammens sebagai berikut:

- $0 < II \leq 0,2$: tingkat inklusif sangat tinggi
- $0,2 < II \leq 0,4$: tingkat inklusif tinggi
- $0,4 < II \leq 0,6$: tingkat inklusif menengah
- $0,6 < II \leq 0,8$: tingkat inklusif rendah
- $0,8 < II \leq 1$: tingkat inklusif sangat rendah

Rumus normalisasi *min-max* untuk komponen tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan adalah:

$$X' = \frac{x - \min}{\max - \min} (\max^* - \min^*) + \min^* \quad (1)$$

Rumus normalisasi *min-max* untuk komponen penyerapan tenaga kerja adalah:

$$X'' = -\frac{x - \min}{\max - \min} (\max^* - \min^*) + \min^* + \max^* \quad (2)$$

Rumus menghitung Indeks Inklusif II adalah:

$$II = \frac{X'_{Kemiskinan} + X'_{Ketimpangan} + X''_{Penyerapan tenaga kerja}}{3} \quad (3)$$

Keterangan:

- X' : nilai hasil normalisasi *min-max*
- X'' : nilai hasil normalisasi *min-max*
- \min : nilai minimal dalam kelompok data observasi
- \max : nilai maksimal dalam kelompok data observasi
- \min^* : nilai terkecil yang diinginkan ($\min^* = 0$)
- \max^* : nilai terbesar yang diinginkan ($\max^* = 1$)
- II : indeks inklusif II
- $X'_{Kemiskinan}$: nilai normalisasi *min-max* tingkat kemiskinan
- $X'_{Ketimpangan}$: nilai normalisasi *min-max* tingkat ketimpangan distribusi pendapatan
- $X''_{Penyerapan tenaga kerja}$: nilai normalisasi *min-max* tingkat penyerapan tenaga kerja

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga model pendekatan yang dapat digunakan dalam estimasi model regresi data panel, yaitu *Common Effects Model* (CEM), *Fixed Effects*

Model (FEM), dan *Random Effects Model* (REM). CEM merupakan model regresi data panel yang tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara unit *cross section* maupun antar periode waktu (*time series*), sehingga menghasilkan estimasi dengan intersep dan *slope* yang sama untuk setiap individu. FEM merupakan model regresi data panel yang memperhatikan adanya keberagaman (heterogenitas) individu dengan adanya intersep pada masing-masing individu. Selain itu, meskipun antar individu memiliki intersep yang berbeda tetapi *slope* tetap diasumsikan konstan antar unit *cross section* maupun antar waktu. REM merupakan model regresi data panel yang mengakomodasi perbedaan karakteristik antar unit *cross section* dan antar waktu yang dimasukkan dalam komponen error pada model.

Bentuk umum dari *Common Effects Model* (CEM) (Gujarati & Porter, 2013):

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + v_{it} \quad (4)$$

Bentuk umum dari *Fixed Effects Model* (FEM):

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + v_{it} \quad (5)$$

Bentuk umum dari *Random Effects Model* (REM):

$$\begin{aligned} Y_{it} &= \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + (\mu_i + v_{it}) \\ Y_{it} &= \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + u_{it} \end{aligned} \quad (6)$$

Keterangan:

i : unit individu ke- i ($i = 1, 2, \dots, N$)

t : waktu ke- t ($t = 1, 2, \dots, T$)

α : rata-rata nilai intersep untuk semua individu

α_i : intersep dengan nilai yang berbeda-beda untuk tiap unit individu

β_k : koefisien regresi variabel independen ke- k

X_{kit} : variabel independen ke- k untuk unit individu ke- i dan waktu ke- t

Y_{it} : variabel dependen untuk unit individu ke- i dan waktu ke- t

μ_i : komponen *error cross-section* yang bersifat acak

v_{it} : komponen *error* gabungan dari *cross-section* dan *time series*

Dalam menentukan model regresi data panel yang terbaik di antara tiga model yang telah dijelaskan, maka dilakukan tiga uji, yaitu uji Chow untuk menguji model yang lebih baik antara CEM dan FEM, uji *Breusch Pagan Lagrange Multiplier* (BP-LM) untuk menguji model yang lebih baik antara CEM dan REM, dan uji Hausman untuk menguji model yang lebih baik antara FEM dan REM.

Model regresi data panel yang terpilih perlu dilakukan pengujian asumsi klasik agar estimasi yang dihasilkan memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) (Gujarati & Porter, 2013). Asumsi klasik pada model regresi data panel diantaranya normalitas error, homoskedastisitas, non-multikolinieritas, dan non-autokorelasi. Asumsi normalitas terpenuhi jika residual berdistribusi normal. Sementara itu, homoskedastisitas mengasumsikan bahwa

residual dari model memiliki varians yang konstan ($var(\varepsilon_i) = \sigma^2$). Pelanggaran asumsi homoskedastisitas memiliki konsekuensi yaitu estimator yang dihasilkan pada metode OLS tetap linear, unbiased dan konsisten, tetapi tidak memiliki varians yang minimum sehingga estimator yang dihasilkan tidak efisien (Gujarati & Porter, 2013). Pemeriksaan multikolinearitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan antar variabel independen, sedangkan uji non-autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar residual.

Selanjutnya, pengujian keberartian model yang bertujuan untuk mengetahui keberartian model dalam menunjukkan hubungan antar variabel (parsial dan simultan) dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Pengujian keberartian model dilakukan menggunakan koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R²*), pengujian simultan dengan uji F, dan pengujian parsial dengan uji t.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi keragaman variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Nilai koefisien determinasi selalu bertambah seiring bertambahnya jumlah variabel bebas yang terdapat dalam model regresi. Alternatif untuk menghilangkan pengaruh penambahan variabel independen yang akan meningkatkan nilai *R²* adalah dengan *adjusted R²*. Koefisien determinasi memiliki nilai yang berkisar di antara nol hingga satu. Nilai koefisien determinasi yang semakin mendekati satu menunjukkan variabel independen semakin baik dalam menjelaskan keragaman dari variabel dependennya, begitu pula sebaliknya. Lalu, uji simultan dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji parsial digunakan untuk melihat apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tahapan pengujian regresi data panel disajikan pada Gambar 3. Dengan demikian, model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

$$Ii_{it} = \alpha + \beta_1 IPTIK_{it} + \beta_2 LNPMTB_{it} + \beta_3 TPAK_{it} + \beta_4 LNDAU_{it} + \beta_5 LNPAD_{it} + u_{it} \quad (7)$$

i : provinsi, $i =$ Aceh, Sumatera Utara, ..., Papua

t : tahun, $t = 2012, 2013, \dots, 2020$

Ii_{it} : indeks inklusif II

$IPTIK_{it}$: indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi

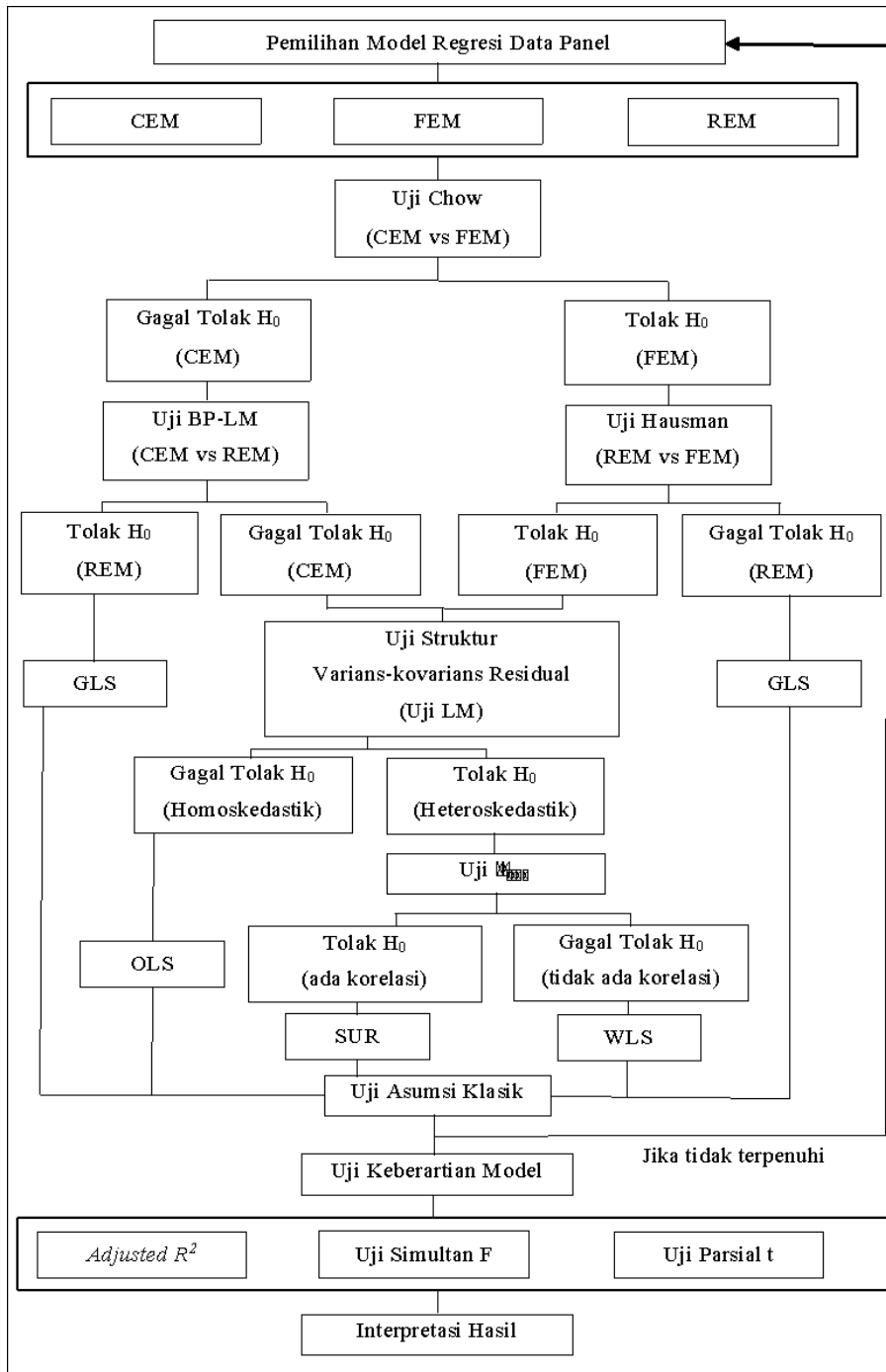
$LNPMTB_{it}$: logaritma natural pembentukan modal tetap bruto

$TPAK_{it}$: tingkat partisipasi angkatan kerja

$LNDAU_{it}$: logaritma natural dana alokasi umum

$LNPAD_{it}$: logaritma natural pendapatan asli daerah

u_{it} : error komposit



Gambar 3. Tahapan pengujian regresi data panel

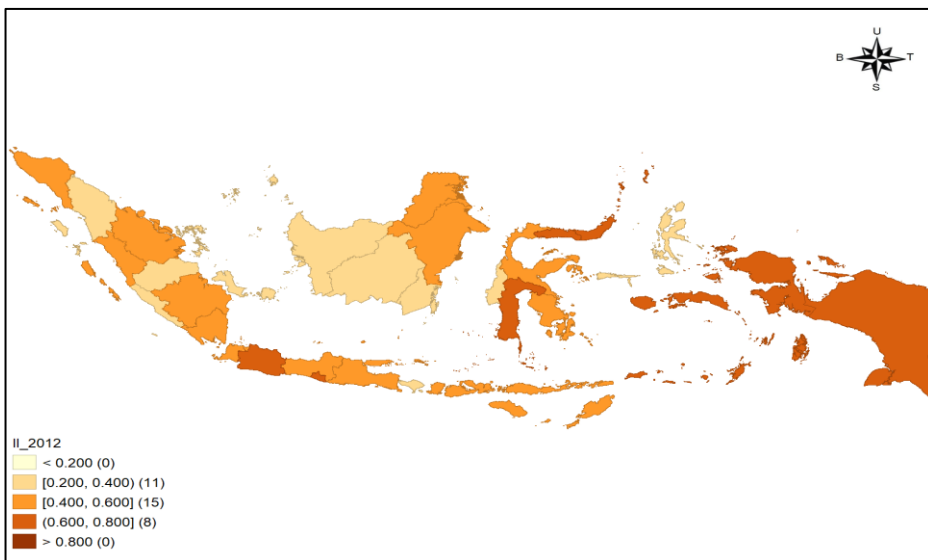
Sumber: Gujarati & Porter (2013), diolah

III. Hasil, Analisis dan Pembahasan

3.1. Gambaran umum pertumbuhan inklusif dan variabel sosial ekonomi Indonesia

Konsep pertumbuhan inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Kondisi pertumbuhan inklusif diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan Indeks Inklusif II yang dirumuskan oleh Ramos et al. (2013) yang terdiri atas 5 kategori dengan nilai indeks inklusif berkisar di antara nol hingga satu. Berdasarkan Indeks Inklusif II, keadaan pertumbuhan inklusif Indonesia menurut provinsi disajikan pada Gambar 4 dan Gambar 5. Tingkat pertumbuhan inklusif 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2020 menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Pada periode yang sama, sebagian besar wilayah di Indonesia didominasi dengan pertumbuhan inklusif menengah.

Berdasarkan Gambar 4, seluruh wilayah di Indonesia berada di tingkat pertumbuhan inklusif tinggi, menengah, dan rendah. Tidak ada satupun provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan inklusif sangat tinggi maupun sangat rendah. Selain itu, terdapat 11 provinsi dengan kategori pertumbuhan inklusif tinggi, 15 provinsi dengan kategori pertumbuhan menengah, dan 8 provinsi dengan kategori pertumbuhan rendah. Sementara itu, berdasarkan Gambar 5 terdapat satu provinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan inklusif sangat tinggi yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kategori lainnya, terdapat 13 provinsi dengan pertumbuhan inklusif tinggi, 15 provinsi dengan pertumbuhan inklusif menengah, dan 5 provinsi dengan pertumbuhan inklusif rendah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan pada tahun 2020 semakin inklusif jika dibandingkan tahun 2012.



Gambar 4. Tingkat pertumbuhan inklusif 34 provinsi di Indonesia tahun 2012

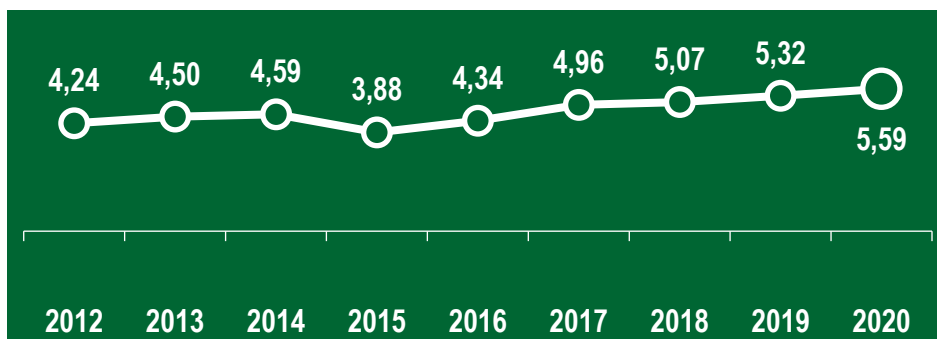
Sumber: data (diolah)



Gambar 5. Tingkat pertumbuhan inklusif 34 provinsi di Indonesia tahun 2020

Sumber: data (diolah)

Penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran di Indonesia menjadi salah satu faktor pertumbuhan menjadi semakin inklusif. Penurunan tingkat pengangguran terjadi seiring meningkatnya kesempatan kerja, tumbuhnya unit-unit usaha kecil dan menengah yang menciptakan lapangan kerja dan semakin luasnya lapangan usaha. Selain itu meningkatnya berbagai sarana dan prasarana ekonomi sehingga menyebabkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pasar yang mampu mendorong aktivitas masyarakat dalam akselerasi pembangunan perekonomian.



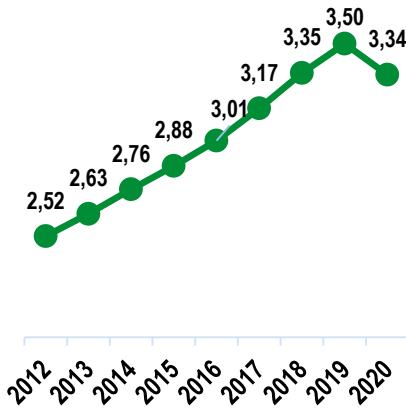
Gambar 6. Perkembangan IP-TIK di Indonesia

Sumber: data (diolah)

Gambar 6. menunjukkan IP-TIK Indonesia dari tahun 2012 hingga 2020 cenderung meningkat, terjadi peningkatan sebesar 1,35 satuan dalam kurun waktu 9 tahun. IP-TIK merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK (BPS, 2022). Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai IP-TIK terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lain selama tahun 2012-2020. Hal ini menunjukkan bahwa potensi dan progress pembangunan TIK di Provinsi DKI Jakarta lebih optimal dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

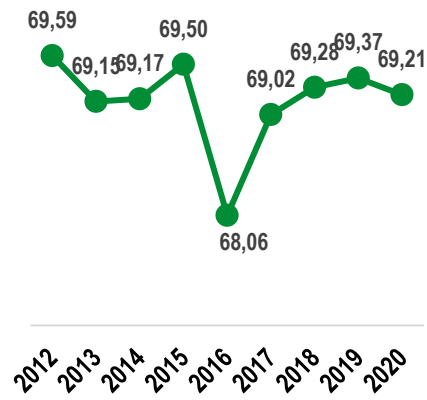
Sementara itu, PMTB atau investasi fisik merupakan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB Indonesia mengalami peningkatan selama tahun 2012 hingga 2019 (Gambar 7). Pada tahun 2020, PMTB menurun sebesar 160 triliun rupiah akibat dampak dari pandemi Covid-19. Provinsi DKI Jakarta adalah penyumbang PMTB terbesar di Indonesia pada tahun 2020, mencapai 695 triliun rupiah atau setara dengan 21 persen PMTB Indonesia.

Dari sisi ketenagakerjaan, TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Gambar 8 menunjukkan bahwa perkembangan TPAK di Indonesia cenderung berfluktuasi selama tahun 2012-2020. Nilai TPAK di Indonesia tahun 2012 sebesar 69,59 persen dan turun menjadi 69,21 persen di tahun 2020. Sama halnya dengan Indonesia, perkembangan TPAK provinsi juga berfluktuasi. Misalnya di Provinsi Sumatera Utara yang TPAK pada tahun 2012 sebesar 74,49 dan mengalami penurunan menjadi 72,12 pada tahun 2020. Di sisi lain Provinsi Aceh memiliki TPAK 65,67 di tahun 2012 dan meningkat menjadi 66,32 pada tahun 2020. Peningkatan TPAK artinya semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.



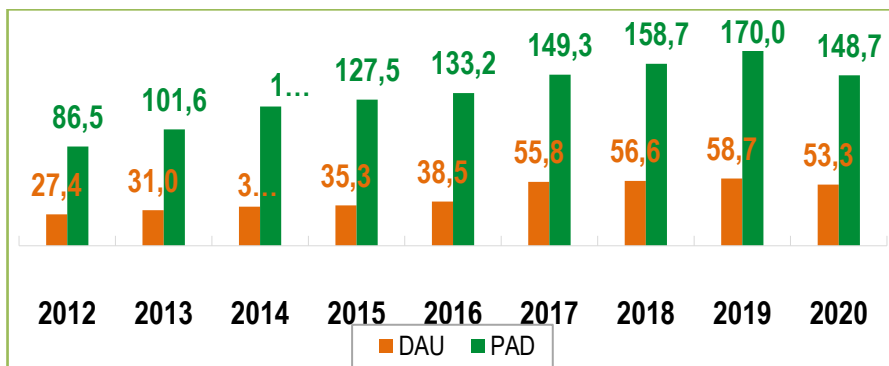
Gambar 7. PMTB Indonesia tahun 2012-2020 (ribu triliun rupiah)

Sumber: data (diolah)



Gambar 8. TPAK Indonesia tahun 2012-2020 (%)

Sumber: data (diolah)



Gambar 9. Perkembangan DAU dan PAD di Indonesia (triliun rupiah)

Sumber: data (diolah)

Gambar 9. menunjukkan bahwa DAU dan PAD Indonesia cenderung mengalami kenaikan selama tahun 2012 hingga 2020. Provinsi DKI Jakarta yang merupakan daerah dengan penghasil PAD terbesar di Indonesia (25 persen dari PAD nasional), selama 5 tahun terakhir (2015-2020) tidak mendapatkan alokasi DAU yang bersumber dari APBN Indonesia. Provinsi DKI Jakarta dinilai mandiri secara ekonomi karena dapat mengelola potensi daerah tersebut secara optimal. Provinsi-provinsi yang memiliki nilai IP-TIK dan TPAK tinggi, berkontribusi besar dalam PMTB nasional, menghasilkan PAD besar, dan tidak bergantung dengan DAU yang dialokasikan negara diharapkan memiliki inklusivitas yang tinggi.

3.2. Determinan tingkat pertumbuhan inklusif Indonesia

Metode dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan inklusif di Indonesia pada tahun 2012-2020. Pada awalnya dilakukan pembentukan tiga model data panel, yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Kemudian, dilakukan pemilihan model terbaik menggunakan uji Chow dan uji Hausman (Tabel 1). Pemilihan model terbaik antara *common effect model* dan *fixed effect model* dilakukan dengan uji Chow. Hasil pengujian menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga keputusan yang dihasilkan adalah tolak hipotesis nol. Kesimpulannya yaitu dengan tingkat signifikansi 5 persen, disimpulkan bahwa *fixed effect model* lebih baik daripada *common effect model*.

Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah uji Hausman yang digunakan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model*. Hasil pengujian menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,9208 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga keputusan yang dihasilkan adalah gagal tolak hipotesis nol. Kesimpulannya yaitu dengan tingkat signifikansi 5 persen, disimpulkan bahwa *random effect model* lebih baik dibandingkan dengan *fixed effect model*. Setelah dilakukan berbagai tahapan dan pengujian, didapatkan model estimasi regresi yaitu *random effect model*. Model ini telah memenuhi asumsi non-multikolinieritas (Tabel 2) dan error stationer pada level (Tabel 3).

Tabel 1. Pemilihan model terbaik pada data panel

Uji	Statistik	Df	<i>p-value</i>
Uji Chow	823,4809	33	0,0000
Uji Hausman	1,4315	5	0,9208

Sumber: data (diolah)

Tabel 2. Pemeriksaan multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 01/17/22 Time: 09:59

Sample: 2012 2020

Included observations: 306

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.074447	139.4257	NA
IPTIK	1.77E-05	2.464190	1.751648
LNPMTB	0.000226	132.6390	1.841677
TPAK	1.82E-06	17.78164	1.027707
LNDAU	3.05E-06	2.882033	1.835825
LNPAD	8.54E-06	5.160983	1.912556

Sumber: data (diolah)**Tabel 3.** Uji Levin, Lin & Chu (LLC)

Null Hypothesis: Unit root (common unit root process)

Series:
RESID01Date:
01/17/22
Time: 11:20Sample:
2012 2020Exogenous variables: Individual effects,
individual linear trendsUser-
specified
lags: 1Newey-West automatic bandwidth
selection and Bartlett kernelTotal
(balanced)
observations:
238Cross-sections
included: 34

Method	Statistic	Prob.**
Levin, Lin & Chu t*	- 17.5188	0.0000

** Probabilities are computed assuming
asymptotic normality**Sumber:** data (diolah)

Asumsi non-multikolinieritas terpenuhi apabila nilai *centered* VIF dari semua variabel independen kurang dari 10 (Gujarati & Porter, 2013). Asumsi error stationer pada level terpenuhi apabila keputusan dari uji LLC adalah tolak hipotesis nol. Sementara itu, metode estimasi yang digunakan pada *random effect model* adalah *feasible generalized least square* (FGLS), sehingga sudah mengakomodir masalah heteroskedastisitas dan *cross-sectional correlation* pada data (Gujarati & Porter, 2013). Persamaan yang terbentuk berdasarkan hasil estimasi di atas sebagai

berikut:

$$\begin{aligned} \widehat{\Pi}_{it} = & 1,0925 - 0,0243IPTIK_{it} * + 0,045LNPMTB_{it} * - 0,0164TPAK_{it} \\ & + 0,0071LNDAU_{it} * - 0,0174LNPAD_{it} * \end{aligned} \quad (8)$$

Keterangan: *) Hasil signifikan pada $\alpha = 5\%$

Tabel 4. Hasil estimasi *random effect model*

Variabel Dependen		Indeks Inklusif (II)				
Variabel Independen	Koefisien	Std. Error	t-statistik	p-value	Ringkasan Statistik	
C	1,0925	0,2729	4,0039	0,0001	R-square	0,4218
IPTIK	-0,0243	0,0042	-5,7906	0,0000	Adjusted R-square	0,4121
LNPMTB	0,0450	0,0150	2,9908	0,0030	F-statistik	43,7660
TPAK	-0,0164	0,0014	-1,2174	0,0000	Prob (F-statistik)	0,0000
LNDAU	0,0071	0,0017	4,0468	0,0001		
LNPAD	-0,0174	0,0029	-5,9676	0,0000		

Sumber: data (diolah)

Variabel sosial ekonomi secara simultan mempengaruhi pertumbuhan inklusif (Tabel 4). Hasil estimasi menunjukkan nilai R_{adj}^2 sebesar 0,4121 yang artinya bahwa 41,21 persen keragaman pertumbuhan inklusif dapat dijelaskan oleh variabel sosial ekonomi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

IP-TIK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia. Setiap kenaikan IP-TIK sebesar satu satuan mengakibatkan penurunan indeks inklusif sebesar 0,0243 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*). Menurunnya indeks inklusif menunjukkan bahwa pertumbuhan di wilayah tersebut semakin inklusif. Adanya teknologi dapat mempermudah suatu usaha/perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, yang selanjutnya akan mendorong kerja perekonomian (Oktavia, 2020). Selain itu, teknologi juga berperan sebagai stimulus perekonomian melalui penambahan output.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang disebut juga dengan investasi fisik, merupakan besaran penambahan dan pengurangan barang modal tetap untuk kebutuhan produksi pada suatu aktivitas ekonomi selama periode tertentu. PMTB berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan inklusif di Indonesia. Setiap kenaikan PMTB sebesar satu persen maka indeks inklusif akan naik sebesar 0,045 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*). Investasi secara umum memiliki hubungan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat berupa penambahan stok mesin dan peralatan, stok perumahan, maupun cadangan. Investasi pada mesin dan peralatan ini lebih kuat efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi daripada komponen investasi lainnya (De Long & Summers, 1991). Investasi mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dalam merealisasikan investasi dibutuhkan tenaga kerja. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Selain itu dengan melakukan investasi berarti kapasitas produksi juga meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan output dan pada

akhirnya akan meningkatkan pendapatan di masyarakat sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan akan mengarahkan ke arah pertumbuhan yang inklusif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa TPAK memiliki koefisien regresi sebesar $-0,0164$ dengan p -value $0,0000$. TPAK memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Koefisien regresi sebesar $-0,0164$ memiliki arti yaitu ketika TPAK meningkat sebesar satu persen maka indeks inklusif akan menurun sebesar $0,0164$ dengan asumsi *ceteris paribus*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Haq & Yuliadi (2018). Peningkatan jumlah angkatan kerja diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap TPAK. Angkatan kerja yang berisi tenaga kerja produktif dan diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja akan meningkatkan produktivitas. Hal ini tentunya akan mengarahkan ke pertumbuhan yang inklusif.

Tabel 5. Efek individu *random effect model*

Provinsi	Efek Individu	Provinsi	Efek Individu
Aceh	0,010410	Nusa Tenggara Barat	0,058010
Sumatera Utara	-0,135927	Nusa Tenggara Timur	0,050954
Sumatera Barat	-0,119329	Kalimantan Barat	-0,098257
Riau	-0,108727	Kalimantan Tengah	-0,163223
Jambi	-0,109942	Kalimantan Selatan	-0,100373
Sumatera Selatan	-0,019482	Kalimantan Timur	-0,063033
Bengkulu	0,043020	Kalimantan Utara	-0,127557
Lampung	-0,041475	Sulawesi Utara	0,070500
Kep. Bangka Belitung	-0,230448	Sulawesi Tengah	-0,00654
Kep. Riau	-0,059808	Sulawesi Selatan	0,057120
Dki Jakarta	0,115197	Sulawesi Tenggara	0,066060
Jawa Barat	0,062220	Gorontalo	0,222462
Jawa Tengah	-0,014727	Sulawesi Barat	-0,031257
Di Yogyakarta	0,214331	Maluku	0,127942
Jawa Timur	-0,037294	Maluku Utara	-0,145578
Banten	0,009121	Papua Barat	0,316740
Bali	-0,059783	Papua	0,248673

Sumber: data (diolah)

Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah pusat dan dibagikan secara adil ke provinsi-provinsi di Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi provinsi tersebut. Dengan adanya DAU diharapkan terciptanya pemerataan kemampuan antar provinsi dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk pemenuhan kebutuhan provinsi (Kemenkeu, 2021). DAU berhubungan negatif terhadap pertumbuhan inklusif, dimana apabila DAU naik satu persen maka indeks inklusif akan naik sebesar $0,0071$ dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*). Hal ini menunjukkan

bahwa peningkatan DAU dari pemerintah pusat tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan inklusif provinsi-provinsi di Indonesia. Menurut Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD, 2016), semakin besar dana dari APBN yang masuk ke provinsi, yang tujuan awalnya guna memenuhi kebutuhan provinsi tersebut, pada suatu titik anggaran DAU tidak dikelola secara maksimal oleh provinsi tersebut. Apabila terus berlanjut dikhawatirkan provinsi-provinsi tersebut semakin tidak mandiri secara ekonomi, dan bergantung pada negara. Banyak DAU yang akhirnya dibelanjakan untuk hal-hal di luar kebutuhan provinsi tersebut, sehingga kenaikan DAU justru akan menurunkan pertumbuhan inklusif di Indonesia.

Berbeda halnya dengan DAU, Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan inklusif. Provinsi-provinsi yang tingkat kemandiriannya tinggi cenderung memiliki PAD yang besar, sehingga DAU yang diterima provinsi tersebut umumnya kecil. Setiap kenaikan PAD sebesar satu persen mengakibatkan penurunan indeks inklusif sebesar 0,0174 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*). Jika PAD meningkat, maka tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berupaya untuk menggali potensi-potensi daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan inklusif (Putri, 2015). Sementara itu, efek individu yang dihasilkan dari *random effect model* disajikan pada Tabel 5.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat pertumbuhan inklusif di Indonesia pada tahun 2012 berada di tingkat pertumbuhan inklusif menengah. Dalam kurun waktu 9 tahun, terdapat 10 provinsi dengan kinerja perekonomian yang semakin inklusif, 2 provinsi dengan kinerja perekonomian yang semakin tidak inklusif, dan 22 provinsi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pertumbuhan inklusif. Hasil estimasi regresi menunjukkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan inklusif di Indonesia. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan inklusif.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan yaitu pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan dana alokasi umum, agar tujuan dana alokasi umum untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan dapat terpenuhi. Selain itu, pemerintah pusat maupun daerah hendaknya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memperluas lapangan pekerjaan di wilayah masing-masing. Hal ini bertujuan agar masalah pengangguran dapat teratasi dan tenaga kerja produktif dapat terserap dengan baik, yang selanjutnya dapat menaikkan pendapatan asli daerah. *Transfer knowledge* dari daerah dengan pertumbuhan inklusif sangat tinggi kepada daerah yang pertumbuhan inklusifnya rendah maupun menengah dalam hal teknologi perlu dilakukan.

Daftar Pustaka

Ali, I., & Son, H. H. (2007). Measuring inclusive growth. *Asian Development Review*, 24(1), 11–31. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1833602>

- Ali, I., & Zhuang, J. (2007). Inclusive growth toward a prosperous Asia: Policy implications. *ERD Working Paper Series*, 97, 1–44. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28210/wp097.pdf>
- Anand, R., Mishra, S., & Peiris, S. J. (2013). Inclusive growth: Measurement and determinants IMF. *IMF Working Paper*. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13135.pdf>
- Bappenas. (2018). Pertumbuhan ekonomi inklusif: Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. *Bappenas*, 6729. <https://bappenas.go.id/berita/84-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-mengentaskan-kemiskinan-dan-ketimpangan-di-indonesia-epTex>
- BPS, B. (2021). *Ekonomi dan perdagangan*. <https://www.bps.go.id/>
- BPS, B. (2022). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia 2020 sebesar 5,59 pada skala 0 –10*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/18/1848/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-ip-tik-indonesia-2020-sebesar-5-59-pada-skala-0---10.html>
- De Long, B. J., & Summers, L. H. (1991). Equipment investment and economic growth. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 445–502. <http://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/210a/readings/Delong-Summers.pdf>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2013). Basic econometrics. In *The McGraw-Hill Companies, Inc*. https://cbpbu.ac.in/userfiles/file/2020/STUDY_MAT/ECO/1.pdf
- Handika, F. (2018). *Pengaruh kebijakan otonomi khusus dan infrastruktur terhadap pertumbuhan inklusif Provinsi Papua 2012-2016*. Politeknik Statistika STIS.
- Hapsari Amalina Sholihah, D., Parulian Hutagaol, M., & Asmara, A. (2013). Pertumbuhan inklusif: Fenomena pertumbuhan inklusif di kawasan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(2), 85–112. <https://doi.org/10.29244/jekp.2.2.2013.85-112>
- Haq, N., & Yuliadi, I. (2018). Analisis pengaruh investasi, angkatan kerja dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 2(2), 102–111. <https://host-pustaka.umy.ac.id/index.php/jerss/article/view/9876>
- Hartono, T. (2018). *Analisis pertumbuhan inklusif dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2016*. Politeknik Statistika STIS.
- Kemenkeu. (2021). *Dana alokasi umum* (pp. 1–2). www.djpk.depkeu.go.id
- KPPOD. (2016). *Anggaran negara untuk kepentingan rakyat*. <https://www.kppod.org/berita/view?id=528>
- Maskin, E. (2012). *Pertumbuhan ekonomi tak jamin kesejahteraan*. Kompas. <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/09/05/07410273/pertumbuhan.ekonomi.tak.jamin.kesejahteraan>
- McKinley, T. (2010). Inclusive growth criteria and indicators: An inclusive growth index for diagnosis of country progress. *Asian Development Bank Working Paper*, 14, 1–34. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Inclusive+Growth+Criteria+and+Indicators+:+An+Inclusive+Growth+Index+for+Diagnosis+of+Country+Progress#0>

- Oktavia, T. (2020). Analisis pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Serta pendidikan Terhadap pertumbuhan ekonomi. *Prosiding National Simposium & Conference Ahlimedia*, 1(1), 139–146. <https://doi.org/10.47387/nasca.v1i1.26>
- Putri, Z. E. (2015). Analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 173–186. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340>
- Ramos, R. A., Ranieri, R., Lammens, J.-W., & Et.al. (2013). Mapping inclusive growth. *Workign Paper 105 International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG)*, 105. www.ipc-undp.org
- Sukirno, S. (2004). Makroekonomi teori pengantar edisi ketiga. In *Raja Grafindo Persada*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). Economic development. In *Pearson* (11th ed.). Addison-Wesley. <http://eco.eco.basu.ac.ir/BasuContentFiles/57/57304a77-1269-4081-bd5b-4c66b84b06a4.pdf>